

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai sesuatu cara yang dapat menaikkan penghasilan total dan perkapita melalui perhitungan pertambahan penduduk suatu negara yang diikuti oleh perubahan fundamental terhadap struktur ekonomi negara serta pemerataan penghasilan penduduk (Jonathan, 2012).

Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya, serta membuka lapangan kerja baru melalui kerjasama pemerintah daerah dengan swasta. Pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan untuk membuka lapangan kerja baru bagi penduduknya. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta penduduknya bersama-sama untuk menggali potensi daerah yang berpeluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Arsyad, 1999).

Basri (2010) mendefinikikan pertumbuhan ekonomi sebagai meningkatnya perekonomian di bidang produksi barang atau jasa. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur dalam menganalisis pembangunan pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan masyarakat dari kegiatan ekonomi yang ada di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan, dalam

kegiatan perekonomian berhubungan dengan faktor produksi yang berdampak pada penghasilan masyarakat

Pada hakikatnya, pertumbuhan ekonomi daerah termasuk bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan peningkatan penghasilan pada masyarakat di daerah tersebut yakni meningkatnya nilai tambah di daerah tersebut. Pertambahan tersebut diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal tersebut dapat membari gambaran bahwa beberapa faktor produksi yang ada di daerah tersebut (tenaga kerja, tanah, teknologi, dan modal) secara kasar dapat menumbuhkan kemakmuran daerah tersebut (Tarigan, 2004).

Pada bidang ekonomi, tugas pemerintah daerah yaitu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki. John Glasson (1990) dalam Nudiatulhuda (2007) menyatakan bahwa tiap daerah memiliki kemakmuran yang berbeda-beda yang salah satunya disebabkan karena struktur ekonomi. Perubahan kondisi wilayah supaya lebih makmur bergantung pada usaha dalam pembangunan serta produksi barang dan jasa. Dalam hal ini, kegiatan basis menjadi peran penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena perubahannya memiliki efek multiplier pada perekonomian regional. Pada teori basis ekonomi, permintaan barang dan jasa dari luar daerah menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Arsyad, 1999).

Mengetahui prioritas baik keinginan masyarakat ataupun kondisi potensi yang dimiliki menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Jika dalam pelaksanaannya tidak disesuaikan dengan prioritas tersebut, maka dapat menjadikan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin rendah.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu perubahan pada kegiatan ekonomi di setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui melalui perbandingan pendapatan yang didasarkan atas harga berlaku atau konstan di tahun tertentu. Oleh karena itu, perubahan tersebut hanya terjadi apabila ada perubahan dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan kegiatan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi ciri dari terjadinya pertumbuhan ekonomi. Tolak ukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang dilihat dari kesejahteraan penduduknya akibat hasil pembangunan yang telah didistribusikan di sebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Sadono, 1985:19).

Definisi PDRB menurut Rahardja & Manurung (2008:67) yaitu total dari nilai tambah semua unit produksi pada suatu daerah di periode tertentu, ataupun jumlah seluruh nilai akhir barang dan jasa dari semua unit produksi suatu daerah pada periode tertentu. Terdapat dua versi untuk menghitung PDRB penilaian harga pasar, diantaranya: PDRB dasar harga berlaku dan PDRB dasar harga konstan.

PDRB harga berlaku dapat digambarkan sebagai jumlah nilai tambah barang dan jasa atas harga pasar di periode tertentu. Data PDRB harga belaku dimanfaatkan dalam mengetahui struktur ekonomi dan perubahannya, serta berguna untuk menghitung besar pendapatan

perkapita. Lalu, PDRB harga konstan dapat menyatakan perhitungan nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan harga di periode tahun tertentu sebagai tahun dasar. Periode saat ini, tahun dasar yang digunakan yaitu tahun 2000. PDRB harga konstan berfungsi dalam mengukur kecepatan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa sektor ekonomi yang masuk dalam komponen PDRB diantaranya: transportasi & pergudangan, industri pengolahan, pertanian, perdagangan besar & eceran, pertambangan & penggalian, bangunan, listrik, gas & air bersih, *real estate* informasi & komunikasi, pertahanan & jaminan sosial wajib, penyediaan akomodasi makan & minum, administrasi pemerintah, jasa keuangan & asuransi, jasa perusahaan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya (Sjafrizal, 2014).

Menurut Daryono, dkk (2015) dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka harus mengetahui potensi ekonomi dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Pengembangan potensi ekonomi pada sektor unggulan menjadi prioritas utama karena dapat berperan besar bagi kemajuan ekonomi daerah.

Sedangkan menurut Elsjamina (2014), untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang berperan dalam total PDRB, maka dibutuhkan penggerak dalam pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan sektor basis/unggulan. Sektor tersebut, dapat digunakan sebagai pendorong sektor lain untuk berkembang, seperti: sebagai penyuplai input,

atau menggunakan *output* sektor unggulan untuk input dalam proses produksinya (Widodo, 2006).

Badan Koordinasi Wilayah (BAKORWIL) Madiun sebagai salah satu instansi pembantu Gubernur yang berada di Provinsi Jawa Timur juga berperan untuk merealisasikan pembangunan nasional dari pencapaian pembangunan daerah. Terealisasinya pembangunan nasional, tidak lepas atas kesuksesan pembangunan daerah, dan hal tersebut termasuk tugas penting pemerintah daerah yang di bawahhi Badan Koordinasi Wilayah Madiun, yang meliputi 2 (dua) Kota yakni Kota Kediri dan Kota Madiun dan 8 (delapan) Kabupaten yakni Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan uraian di atas mengenai sektor ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Badan Koordinasi Wilayah Madiun, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul "*Analisis Sektor Ekonomi di Bakorwil Madiun di empat Kabupaten / Kota*", sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir.

1.2 Perumusan Masalah

Dari identifikasi dan latar belakang di atas, di mana Sektor Ekonomi dan Pembangunan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi permasalahan. Maka dalam hal ini, masalah utama penelitian ini adalah:

1. Sektor apa yang mendorong ekonomi di Bakorwil Madiun di empat kabupaten/kota tersebut?
2. Sektor apa yang pertumbuhannya lebih tinggi dari sektor yang sama di Bakorwil Madiun di empat kabupaten/kota tersebut?
3. Sektor apa yang pertumbuhannya lebih tinggi dari sektor yang berbeda di empat kabupaten/kota tersebut?
4. Sektor apa yang menjadi sektor basis di empat kabupaten/kota tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sektor apa yang mendorong ekonomi di Bakorwil Madiun di empat kabupaten/kota tersebut.
2. Untuk mengetahui sektor apa yang pertumbuhannya lebih tinggi dari sektor yang sama di Bakorwil Madiun di empat kabupaten/kota tersebut.
3. Untuk mengetahui sektor yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari sektor yang berbeda di empat kabupaten/kota.
4. Untuk mengetahui sektor basis di empat kabupaten/kota tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber inspirasi, informasi, dan pedoman bagi pengambil kebijakan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sektor ekonomi yang berpotensi di Badan Koordinasi Wilayah Madiun.
2. Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai macam-macam sektor ekonomi di Badan Koordinasi Wilayah Madiun.
3. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa lain.
4. Sebagai syarat dalam menempuh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Sebagai bahan masukan untuk pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Badan Koordinasi Wilayah Madiun.